



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam Menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja PD setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Renja Badan Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Badan Tahun 2025-2026;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja PD berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Renja Badan Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL DAN EVALUASI RENJA BADAN TAHUN N-1

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN

- 3.1 Telaah terhadap Kenijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V PENUTUP

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renja Badan.

Pasal 5

Badan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), meliputi unit organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengadaan ASN, pemberhentian dan fasilitasi profesi ASN, dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian ASN;
- c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan karir jabatan pimpinan tinggi dan administrasi, pelayanan administrasi jabatan fungsional dan kepangkatan, serta pengembangan kompetensi ASN; dan
- d. Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja, dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan disiplin ASN, penilaian kinerja ASN, dan kesejahteraan ASN.

Pasal 6

Perubahan Renja Badan dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD tahun perencanaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan di daerah terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana PD, terdiri atas Renstra PD dan Renja PD. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renstra dan Renja berlaku mutatis mutandis terhadap proses penyusunan perubahan Renstra dan Renja, yang dilakukan PD dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai tahapan, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum PD/lintas PD; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja PD ini memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN N-1

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN N-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa merupakan penjabaran Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan.

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 bersumber dari APDB sebesar Rp 8.083.184.403,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 99,99% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 7.610.921.273.

Sebagai rincian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 melaksanakan 3 (Tiga) program. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terpenuhi kebutuhan keuangannya sebesar 99,23%, Program Kepegawaian Daerah capaian keuangannya sebesar 95,47%, dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian keuangannya mencapai 0,00%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Strategis s.d Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa pada tabel 2.1 :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jln. Garuda Nomor: 103 Telp. (0371) 626571 Sumbawa Besar

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa

No	S	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Kinerja (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra)				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Koharian Kegiatan Tahun n-3				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2				Target Program/Kegiatan Tahun n-1				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun Berjalan	
																				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2024)	Tingkat Realisasi Target Renstra (2024)
				K	Rp	BB	K	K	Rp	BB	K	K	Rp	BB	K	K	Rp	BB	K		
1	2	3	4					2022				2023				2024					
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD		Peningkatan Kategori Kinerja Hasil Evaluasi AKIP BPPSDM	A	19.072.313.134	BB	6.304.689.254	BB	5.658.663.833	BB	5.406.415.236	100,00%	99,34%	BB	6.345.522.203	10	Kp	18.052.927.693	95%		
				83,01	14.128.269.431	72,00	6.304.689.254	74,01	5.658.663.833	72,35	5.406.415.236	97,76%	95,54%	78,01	6.345.522.203			18.052.927.693	128%		
	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	18	117.247.458	23	110.323.000	13	110.860.400	13	109.923.740	100,00%	99,16%	13	97.087.200			317.333.940	271%		
				3	53.130.000	3	42.870.300	3	13.902.400	3	13.265.000	100,00%	95,42%	3	3.225.000			59.360.300	112%		
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.960.000	1	2.999.400	1	3.000.000	1	2.996.000	100,00%	99,87%	1	2.474.800			8.470.200	214%		
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	11.282.478	8	5.672.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-			5.672.000	50%		
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.960.000	1	3.182.100	1	3.000.000	1	2.995.200	100,00%	99,84%	1	2.179.400			8.356.700	211%		
04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2.053.920	8	2.768.000	5	1.556.000	5	1.556.000	100,00%	100,00%	5	8.945.000			13.269.000	646%		
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4.153.380	1	3.420.700	2	3.146.500	2	3.146.500	100,00%	100,00%	2	2.922.000			9.489.200	228%		
06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1	38.707.680	1	49.410.500	1	86.255.500	1	85.965.040	100,00%	99,66%	1	77.341.000			212.716.540	550%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	79	6.352.716.433	66	5.317.912.493	72	4.784.806.833	72	4.538.807.502	100,00%	94,86%	72	5.251.386.680			15.104.407.675	238%		
				65	6.265.809.618	57	5.253.144.693	64	4.716.672.233	64	4.470.712.902	100,00%	94,79%	64	5.191.753.680			14.915.611.275	238%		

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	77.797.500	4	58.507.800	4	63.759.600	4	63.724.600	100,00%	99,98%	4	58.506.000	180.738.400	232%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	1.401.840	4	2.561.000	4	4.375.000	4	4.370.000	100,00%	99,89%	4	1.127.000	8.058.000	575%
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Penerimaan Penerimaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Penerimaan dan Tidak Lanjut Penerimaan	4	2.066.584	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	2.077.214	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3.563.677	1	3.699.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD- PD	6	7.200.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKEMD-SKPD	2	3.600.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD-SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD-SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	4	3.600.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1	3.600.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	3.600.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemulangan Pegawai yang Dipulangkan	Jumlah Pegawai Pendun yang Dipulangkan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahkan tugas	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	2646	310.691.398	2256	575.133.050	2643	506.109.150	2643	504.533.774	100,00%	99,69%	2643	648.028.873	1.737.695.697	559%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	17.137.890	24	5.810.000	23	12.983.250	23	12.921.500	100,00%	99,52%	23	14.281.973	33.013.473	193%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	17.668.200	32	125.085.000	32	138.426.000	32	137.981.000	100,00%	99,68%	32	177.871.400	440.937.400	2496%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.365.008	2	4.141.500	2	4.064.400	2	4.058.000	100,00%	99,84%	2	4.468.000	12.667.500	236%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6	7.986.000	6	77.150.000	6	10.100.000	6	9.950.000	100,00%	98,61%	6	2.500.000	89.610.000	1122%
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	16.368.000	12	13.435.000	12	28.880.000	12	28.135.000	100,00%	97,42%	12	34.632.000	76.202.000	466%
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	211.654.080	12	344.743.450	12	308.237.000	12	308.067.774	100,00%	99,98%	12	419.215.000	1.072.026.224	506%
		Pemertintahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemertintahan Arsip Dinamis pada SKPD	2556	4.512.420	2168	4.768.100	2556	3.418.500	2556	3.410.500	100,00%	99,77%	2556	5.060.500	13.239.100	293%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pemertintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Pemungut Usuran PD	1	7.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemungut Usuran Pemertintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Pemungut Usuran PD	36	181.216.200	36	156.324.511	36	141.283.100	36	137.793.345	100,00%	97,53%	36	133.748.000	427.865.856	236%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.524.000	12	19.075.000	12	10.198.100	12	10.196.500	100,00%	99,98%	12	8.110.000	37.381.500	497%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	12	138.468.000	12	93.132.511	12	102.400.000	12	101.811.845	100,00%	99,43%	12	95.300.000	290.244.356	210%

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	35.224.200	12	44.117.000	12	28.685.000	12	25.745.000	100,00%	89,89%	12	30.338.000	100.240.000	285%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Pemungut Unsur PD	48	152.597.742	39	144.996.200	43	115.604.350	43	115.356.875	100,00%	99,79%	30	205.271.450	465.624.525	303%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Elaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekhara dan dibayarakan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipekhara dan dibayarakan Pajaknya	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Elaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipekhara dan dibayarakan Pajak dan Perizinannya	10	118.261.902	9	103.521.200	10	89.592.350	10	89.348.375	100,00%	99,73%	10	100.370.750	293.240.325	248%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35	7.708.800	27	15.500.000	30	5.840.000	30	5.840.000	100,00%	100,00%	17	20.300.000	41.640.000	540%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	26.627.940	3	25.975.000	3	20.172.000	3	20.168.500	100,00%	99,98%	3	84.600.700	130.744.200	491%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		II Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	(II.1) Peningkatan Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	B	1.887.043.703	C	1.538.836.800	C	1.754.187.600	B	1.646.647.200	100,00%	93,87%	C	1.715.537.200	4.891.001.200	259%
		PROGRAM KEPENGAWAIAN DAERAH	(1) Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kerasanman	25	686.108.184	25	505.600.000	25	937.253.900	23,8	883.379.500	95,20%	94,25%	25	616.158.400	1.997.915.900	291%
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepengawasan ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	13	686.108.184	12	505.600.000	9	937.253.900	9	883.379.500	100,00%	94,25%	9	616.158.400	1.997.915.900	291%
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	4.548.600	1	2.707.000	-	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	961.620	1	2.995.000	1	728.500	1	724.000	100,00%	99,38%	1	1.206.300	4.925.300	512%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	101.834.040	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2	551.816.760	2	430.864.500	2	776.186.900	2	724.680.000	100,00%	93,36%	2	517.384.600	1.672.929.100	303%
		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	3.360.000	1	2.000.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	3.255.840	1	5.996.000	1	3.357.000	1	3.357.000	100,00%	100,00%	1	1.004.500	10.357.500	318%
		Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	5.274.000	1	1.999.500	1	4.677.500	1	4.654.500	100,00%	99,51%	1	3.420.000	10.074.000	191%
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	2.417.760	1	2.995.500	1	67.364.000	1	66.674.000	100,00%	98,98%	1	1.023.000	70.692.500	2924%
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengolahan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengolahan Data dan Informasi ASN	1	4.239.504	1	2.515.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	2.490.600	1	2.702.500	1	17.175.500	1	16.435.500	100,00%	95,63%	1	72.622.000	91.750.000	3684%

1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 1/5
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	4.312.800	1	48.257.000	1	66.434.000	1	65.534.000	100,00%	98,65%	1	18.462.500	1	132.253.500	3067%	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.596.600	1	2.568.000	1	1.330.500	1	1.330.500	100,00%	100,00%	1	1.035.500	1	4.934.000	309%	
		(2) Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	23,82	1.141.023.277	14,82	961.390.800	16,82	736.287.700	18,5	682.740.700	109,99%	92,73%	16,82	1.074.395.000	2.718.726.500	238%		
	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen ASN yang mendapatkan pengembangan karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	8	384.509.004	20	562.831.300	8	403.534.700	7	380.410.200	87,50%	94,27%	8	1.036.649.000	1.979.890.800	515%		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi/Jabatan Puncpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksanaan dan Mutasi ASN antar Daerah	4	349.503.000	13	546.320.800	4	374.515.000	4	351.415.500	100,00%	93,83%	4	27.257.500	924.993.800	265%		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	10.295.604	2	9.524.000	2	10.299.700	1	10.299.700	50,00%	100,00%	2	6.598.000	26.421.700	257%		
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	24.710.400	5	6.986.500	2	18.720.000	2	18.695.000	100,00%	99,87%	2	1.002.793.500	1.028.475.000	4162%		
	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pehyinan Pengembangan Kompetensi	736	756.514.273	625	398.559.500	425	332.753.000	425	302.330.500	100,00%	90,86%	425	37.946.000	738.836.000	98%		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	70	3.037.320	60	79.384.000	70	99.055.000	70	98.720.500	100,00%	99,66%	70	2.535.500	180.640.000	5947%		
	Pengelolaan Asesorment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asesorment Center	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Penilaian Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	300	113.893.025	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2	24.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat, Jabatan Fungsional	5	43.260.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	57	367.882.680	17	313.878.500	55	226.199.000	55	196.111.000	100,00%	86,70%	55	28.089.000	538.078.500	146%		
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2	60.660.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-		

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	0	3.458.400	0	-	0	2.620.000	0	2.620.000	0,00%	0,00%	0	4.466.000	7.086.000	205%
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	300	140.982.848	548	5.297.000	300	4.879.000	300	4.879.000	100,00%	100,00%	300	2.855.500	13.031.500	9%
		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Evaluasi Dilat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Dilat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
			(3) Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPE Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil	26,58	59.912.242	17,58	71.846.000	19,58	80.646.000	39,3	80.527.000	200,72%	99,85%	19,58	24.783.800	174.358.800	291%
		Pendidikan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kinerja ASN	41,05	59.912.242	41,05	71.846.000	41,05	80.646.000	123,2	80.527.000	300,00%	99,85%	41,05	24.783.800	174.358.800	291%
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	4.342.882	1	2.798.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	7.233.609	1	2.979.000	1	20.428.000	1	20.427.500	100,00%	100,00%	1	2.626.500	26.033.000	360%
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	5.965.080	1	3.016.060	1	7.821.000	1	7.819.000	100,00%	99,97%	1	12.256.500	23.091.500	387%
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	625	5.439.720	275	2.995.000	769	5.157.000	769	5.089.500	100,00%	98,69%	769	2.652.400	10.736.900	197%
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150	5.051.640	180	2.890.000	150	4.858.000	150	4.858.000	100,00%	100,00%	150	2.475.500	10.223.500	202%
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	2	2.698.080	2	2.967.000	2	3.187.000	0	3.187.000	0,00%	100,00%	2	-	6.154.000	228%
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan kedisiplinan	300	2.973.960	160	45.079.500	230	16.678.000	230	16.678.000	100,00%	100,00%	230	2.447.000	64.204.500	2159%
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	4.183.080	1	3.072.500	1	3.994.000	1	3.993.000	100,00%	99,97%	1	2.325.900	9.391.400	225%
		Pelayanan Proses Izin Penerimaan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Penerimaan Pegawai yang Dilyangi	12	3.410.880	28	3.059.000	12	3.409.000	12	3.409.000	100,00%	100,00%	12	-	6.468.000	190%
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	18.613.320	1	2.990.000	1	15.114.000	1	15.066.000	100,00%	99,68%	1	-	18.056.000	57%
			(II.2) Peningkatan Indeks Profesionalisme ASN (Dimensi Kompetensi)	7,94	3.060.000.000	7,91	1.179.880.330	7,92	2.500.000	8,71	2.184.500	109,97%	86,18%	7,92	22.125.000	2.154.500	0%
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	3.060.000.000	4,98	1.179.880.330	5,01	2.500.000	6,22	2.184.500	124,15%	86,18%	5,01	22.125.000	2.154.500	0%
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	51	630.000.000	0	-	50	2.500.000	50	2.184.500	100,00%	86,18%	50	-	2.154.500	0%

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+8+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50	600.000.000	0	-	50	2.500.000	50	2.154.500	100,00%	86,18%	50	-	2.154.500	0%
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	30.000.000	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Sertifikasi, Kembangkan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah dokumen Sertifikasi, Kembangkan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun	0	2.430.000.000	2	1.179.880.330	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	22.125.000	-	0%
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kembangkan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Belajar, Kerjasama, Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Seratajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kembangkan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Belajar, Kerjasama, Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Seratajabatan Fungsional yang Disusun	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	-	-	-

1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7		10		11 = 6+9+10	12 = 11/5
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkefela dengan Baik	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	0		0		0		0		0,00%	0,00%	0		-	-
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0		0		0		0		0,00%	0,00%	0		-	-
		Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	0		0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	-	-
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	2.400.000.000	2	1.179.980.330	-	-	0	-	0,00%	0,00%	-	22.125.000	1.202.005.330	50%
		Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1	-		-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
			JUMLAH				9.023.406.384		7.415.351.433	161,3	7.055.216.936		95,14%		8.083.184.403	22.946.083.393	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggaran pelayanan dalam bidang kepegawaian menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa.

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa pada tabel T-C.30 diketahui bahwa capaian indikator kinerja BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 telah mencapai target pada sasaran perangkat daerah. Untuk proyeksi capaian pada tahun 2025 dan tahun 2026 tingkat realisasinya di proyeksikan mencapai 100%. Berdasarkan Tabel T-C.30 dapat diketahui tingkat capaian indikator kinerja BKPSDM pada tahun 2024 telah mencapai target jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Tabel T-C. 30 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1	Peningkatan Kategori Kriteria Hasil Evaluasi AKIP BKPSDM			BB	BB	BB	BB	A	A		BB	BB	BB	A	
2	Peningkatan Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN			C	C	C	C	B	B		B	B	B	B	
3	Peningkatan Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi ASN			7,71	7,91	7,92	7,93	7,94	7,94	7,94	9,03	26,13	26,13	26,13	

a. Sasaran 1 : Peningkatan Kategori Kriteria Hasil Evaluasi AKIP BKPSDM

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis 1 diperoleh dari hasil penilaian Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat . Capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 ini diantaranya adalah:

- Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah bersama-sama dengan jajarannya untuk meningkatkan kualitas disiplin administrasi kepegawaian khususnya di Kabupaten Sumbawa
- Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang kompeten dan professional dalam meningkatkan proporsi berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing.
- Tersedianya anggaran dalam mendukung peningkatan program

b. Sasaran 2 : Peningkatan Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

Dari evaluasi capaian kinerja sasaran strategis 2 Peningkatan **Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN** diperoleh dari Surat Badan Kepegawaian Negara dengan memperlihatkan capaian kinerja sebesar **100%**. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 ini :

- Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah bersama-sama dengan jajarannya mulai dari sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian sampai dengan staf pelaksana untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya di Kabupaten Sumbawa
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan professional di masing-masing bidang kompetensinya
- Serta sarana prasarana pendukung yang cukup memadai

c. Sasaran 3 : Peningkatan Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi ASN

Dari evaluasi capaian kinerja sasaran strategis 3 **Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN** diperoleh dari Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Pembangunan BKN dengan memperlihatkan capaian kinerja telah melebihi target. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 ini :

- Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah bersama-sama dengan jajarannya mulai dari sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian sampai dengan staf pelaksana untuk

meningkatkan kompetensi pegawai khususnya di Kabupaten Sumbawa

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan professional di masing-masing bidang kompetensinya
- Serta sarana prasarana pendukung yang cukup memadai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang kepegawaian, adapun isu-isu tersebut antara lain:

1. Aparatus Sipil Negara yang tidak professional.
2. Implementasi system merit yang parsial.
3. System Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi
4. Birokrasi yang kompleks dan lambat.
5. Regulasi kepegawaian yang terus berubah-ubah.

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten
2. Dukungan kepemimpinan yang kuat
3. Kemitraan strategis dengan pihak eksternal

b. Kelemahan

1. Kurangnya system penghargaan dan sanksi yang efektif
2. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
3. Belum optimalnya sarana dan prasana penunjang kinerja aparatur
4. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi ASN

c. Peluang

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Kolaborasi dengan instansi terkait
3. Dukungan teknologi informasi yang lebih baik

d. Tantangan

1. Perubahan kebijakan nasional
2. Tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur
3. Aturan kepegawaian yang dinamis
4. Sumber daya yang semakin terbatas

Dari isu-isu penting, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa menentukan kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
2. Pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi agar dapat diakses dengan mudah
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana
4. Peningkatan Kualitas dokumen perencanaan dan Pelaporan serta kualitas pelayanan PD
5. Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2023, program indikatif di tahun 2025 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa mengajukan 10 Kegiatan yang terdiri dari 44 SubKegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sumbawa :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jln. Garuda Nomor: 103 Telp. (0371) 626571 Sumbawa Besar

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMBAWA

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Target	Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Target	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	B K P S D M	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	83,01	7.186.518.384	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	B K P S D M	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	83,01	15.952.400.892	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	36.423.420			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	117.247.458	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	3	3.547.500			Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	3	53.130.000	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.722.280			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	3.960.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	-			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	11.282.478	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	2.397.340			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3.960.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	9.839.500			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2.053.920	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2.057.000			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4.153.380	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.859.800			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	1	38.707.680	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	79		6.181.479.819	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	79
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65	6.120.764.769			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	6.265.809.618	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	59.475.350			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4	77.797.500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1.239.700			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	4	1.401.840	
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	-			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	2.066.584	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	-			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran	1	2.077.214	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	-			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	3.563.677	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi BMD- PD	6	-		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi BMD-PD	6	7.200.000		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen RKBM/ SKPD	2	-		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen RKBM/ SKPD	2	3.600.000		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan BMD- SKPD	-	-		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan BMD- SKPD	-	-		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD- SKPD	-	-		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD- SKPD	-	-		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	-	-		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD pada SKPD	-	-		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	4	-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	4	3.600.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	-	-		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	-	-		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	1	3.600.000		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	3.600.000	
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		-		Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		-		
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		-		
	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		-		Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan		-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD		2.646	265.103.820	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD		2.646	310.691.598	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25	15.710.170	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		25	17.137.890	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		32	20.526.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		32	17.668.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	4.914.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	5.365.008	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		6	2.750.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		6	7.986.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		-		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		0	-	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12	33.422.400	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12	16.368.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	183.645.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	211.654.080	

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	2.556	4.135.450			Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	2556	4.512.420		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1	-			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1	30.000.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1	-			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1	7.000.000.000		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	7.000.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	36	161.613.650			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	36	181.216.200		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.897.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.524.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	12	126.830.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	12	138.468.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	27.886.650			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	35.224.200		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	48	175.734.185			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	48	152.597.742		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	-			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	-		

diwujudkan dalam bentuk...

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	98.407.495		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	118.261.902	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	0	-		Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	0	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35	22.330.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35	7.708.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	54.996.700		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	26.627.040	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	-	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan	25	19.438.540	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan	25	686.108.184	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN		Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	13	19.438.540		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN		Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian ASN	13	686.108.184	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	-		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1	4.548.600	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1.326.930		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	961.620	
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	-		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1	101.834.040	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2	11.424.160		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2	551.816.760	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	-		Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1	3.360.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	1.104.950		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	3.255.840	
	Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	1.114.300		Evaluasi Pemberhentian ASN		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1	5.274.000	
	Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	1.125.300		Fasilitas Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	2.417.760	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1	-		Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1	4.239.564	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	1	1.100.550		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawalan	1	2.490.600	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1.103.300		Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	4.312.800	
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.139.050		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1.596.600	
PROGRAM KEPEGAWAJAN DAERAH			Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	23,82	346.724.950		PROGRAM KEPEGAWAJAN DAERAH		Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	23,82	1.141.023.277	
	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah dokumen ASN yang mendapatkan pengembangan karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	8	334.096.950		Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah dokumen ASN yang mendapatkan pengembangan karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	8	384.509.004	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	13.373.250		Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN	4	349.503.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	3.318.150		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	10.295.604	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	317.405.550		Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	24.710.400	
	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Pengembangan Kompetensi	736	12.628.000		Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Pelayanan Pengembangan Kompetensi	736	756.514.273	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	70	2.789.050		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	70	3.037.320	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0	-		Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	0	-	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	-		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	0	-	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0	-		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	0	-	
	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300	-		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	300	113.893.025	
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2	-		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2	24.000.000	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	0	-		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	0	-	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5	-		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	5	43.260.000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	57	3.397.900		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	57	367.882.680	

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	3.060.000.000	
Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi ASN	50	-	Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti, dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan rencana pengembangan	50	630.000.000	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0	-		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0		
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		-		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50	-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50	600.000.000	
	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	-		Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1	30.000.000	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Jumlah dokumen Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun	4	-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Jumlah dokumen Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang disusun	4	2.430.000.000	

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	0			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	0			
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	-			Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	-			
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	-			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	-			
	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-			Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	-			
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1	30.000.000		
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	-			Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	-			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2	2.400.000.000		
	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	1			Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan	1			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa tidak mendapatkan input berupa masukan atau usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga tidak ada program atau kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam rencana kerja BKPSDM Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Untuk meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa berusaha untuk meyelaraskan dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa dapat dioptimalkan.

Komitmen Badan Kepegawaian Negara untuk membangun sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil dituangkan dalam visi Badan Kepegawaian Negara dalam Rencana Strategis, yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi, yaitu profesional, netral, dan sejahtera.

- **Profesional**, Istilah 'profesional' dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan berorientasi pada prestasi kerja.
- **Netral**, Istilah 'netral' dimaksudkan bahwa Pegawai Negeri Sipil bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras, dan agama.
- **Sejahtera**, Yang dimaksud dengan 'sejahtera' adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat memenuhi tingkat hidup layak bagi diri dan keluarganya. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas marjinal, serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang bersih dari KKN.

Ada beberapa kebijakan dan sasaran strategis nasional yang dapat disesuaikan dengan konteks Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, diantaranya seperti pada

tabel berikut :

Tabel 3.1
Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, BKD Provinsi NTB,
BKPSDM Kab. Sumbawa

NO	SASARAN STRATEGIS			
	BKN	BKD PROVINSI NTB	BPSDMD PROVINSI NTB	BKPSDM KAB.SUMBAWA
1	Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN	Mewujudkan Majemen ASN yang Meritokrasi	Meningkatnya Kompetensi ASN	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD
2		Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sumbawa didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKPSDM Kab. Sumbawa

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Kualitas RB dengan Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Peningkatan Kategori Kriteria Hasil Evaluasi AKIP BKPSDM
2	Manjemen ASN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen ASN	Peningkatan Kategori Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Peningkatan Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi ASN

3.3 Program dan Kegiatan

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2024 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan Kepegawaian Tahun 2025. Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Sumbawa

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		Mutasi dan Promosi ASN
		Pengembangan Kompetensi ASN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Di Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa merencanakan 10 (Sepuluh) Kegiatan dan dijabarkan menjadi 44 (Empat Puluh Empat) Sub kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja PD Tahun 2025 terlampir.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jln. Garuda Nomor: 103 Telp. (0371) 626571 Sumbawa Besar

RENCANA KERJA TAHUN 2025
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMBAWA

[illegible]

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target		
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	BKPSDM	83,01	5	100%	9.773.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	5	2.053.920		
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	BKPSDM	83,01	#N/A	100%	2.056.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	2	4.153.380		
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	BKPSDM	83,01	1	100%	87.291.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	1	38.707.680		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.514.794.760				6.352.716.433		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan	BKPSDM	83,01	65	100%	5.451.939.760	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	65	6.265.809.618		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan	BKPSDM	83,01	4	100%	60.675.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	4	77.797.500		
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan	BKPSDM	83,01	#N/A	100%	2.180.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	4	1.401.840		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok ukur			Target		
5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan	BKPSDM	83,01	0	100%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	4	2.066.584			
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase capaian kegiatan penyediaan administrasi keuangan	BKPSDM	83,01	0	100%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	1	2.077.214			
5 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase capaian kegiatan	BKPSDM	83,01	0	100%	-	Dana Transfer Umum- Dana	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	1	3.563.677			
5 03 01 2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM							1.569.568.273					310.691.598		
5 03 01 2.03 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		BKPSDM	83,01	23	100%	15.853.773	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	25	17.137.890			
5 03 01 2.03 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		BKPSDM	83,01	32	100%	1.294.758.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	32	17.668.200			
5 03 01 2.03 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		BKPSDM	83,01	2	100%	4.993.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	2	5.365.008			
5 03 01 2.03 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		BKPSDM	83,01	6	100%	2.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	6	7.986.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kineja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
5 03 01 2.03 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		BKPSDM	83,01	12	100%	33.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	12	16.368.000	
5 03 01 2.03 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		BKPSDM	83,01	12	100%	214.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	12	211.654.080	
5 03 01 2.03 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		BKPSDM	83,01	2556	100%	4.133.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	2556	4.512.420	
5 03 01 2.03	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		BKPSDM	83,01	0	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	1	30.000.000	
5 03 01 2.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		BKPSDM	83,01	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	100%	-	
5 03 01 2.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM	83,01	12	100%	118.804.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM		181.216.200	
5 03 01 2.04 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		BKPSDM	83,01	12	100%	6.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	12	7.524.000	

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Kegiatan

5	03	01	2.04	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai AKIP BKPSDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BKPSDM	83,01	3	100%	2.551.019.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	26.627.040			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	4.548.600	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	1	100%	1.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	961.620	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	101.834.040	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Idikatif (Rp.)	Tolok ukur			Target		
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	BKPSDM	25	2	100%	484.259.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	2	551.816.760	
5 03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	BKPSDM	25	0	0%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	3.360.000	
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	BKPSDM	25	1	100%	2.774.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	3.255.840	
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	BKPSDM	25	1	100%	5.464.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	5.274.000	
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentia n	BKPSDM	25	1	100%	95.547.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	2.417.760	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok ukur			Target	
5 03 02 2.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	4.239.564		
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	1	100%	71.937.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	2.490.600		
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	1	100%	17.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	4.312.800		
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengadaan dan pemberhentian	BKPSDM	25	1	100%	2.410.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1	1.596.600		
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								1.473.520.500				384.509.004		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah yang mendapatkan pengembangan karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	BKPSDM	23,82	4	100%	224.701.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	4	349.503.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	BKPSDM	23,82	2	100%	4.519.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	2	10.295.604	
		Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	BKPSDM	23,82	2	100%	1.244.299.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	2	24.710.400	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n karir melalui promosi dan kenaikan pangkat	BKPSDM	23,82	2	100%	1.396.259.000				756.514.273	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	70	100%	1.386.421.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	70	3.037.320	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	55	100%	3.397.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	57	367.882.680	
5	03	02	2.03	09	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)					Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	BKPSDM	23,82	0	0%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	300	113.893.025		
				Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	0	0%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	2	24.000.000		
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	0	0%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	5	43.260.000		
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembang n kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	0	0%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai Implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	2	60.000.000		
5	03	02	2.03	05	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN												
5	03	02	2.03	06	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN												
5	03	02	2.03		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional												
5	03	02	2.03		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kineja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
5	03	02	2.03	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	0	100%	3.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	3.458.400
5	03	02	2.03	12	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan	BKPSDM	23,82	300	100%	3.140.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300	140.982.848
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	0	0%	376.837.050			59.912.242
5	03	02	2.04	01	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	26,58	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	4.342.882
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	26,58	1	100%	2.889.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	7.233.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Catatan Penting			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok ukur	Target			
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	1	100%	262.986.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	5.965.080	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	395	100%	6.600.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			625	5.439.720	
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	150	100%	36.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150	5.051.640	
5 03 02 2.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	2.698.080	
Catatan Penting															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kineja			Pagu Idikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok ukur	Target	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	230	100%	65.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	300	2.973.960
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	0	0%	2.401.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	1	4.183.080
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	12	3.410.880
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dinilai dan mendapatkan evaluasi kinerja	BKPSDM	26,58	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai implementasi Elemen NSPK Manajemen ASN Bidang Pembinaan Disiplin, Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	1	18.613.320
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												-
5 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025				Catatan Penting				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Idikatif (Rp.)		Tolok ukur	Target	
5	04	02	2.01	Peningkatan Kompetensi Teknis													
				Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan pengembangan	BKPSDM	5,04	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-		
5	04	02	2.01	Peningkatan Kompetensi Teknis													
				Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan pengembangan	BKPSDM	5,04	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-		
5	04	02	2.01	Peningkatan Kompetensi Teknis													
				Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan sesuai kebijakan teknis dan pengembangan	BKPSDM	5,04	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-		
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
				Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah dokumen sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang disusun	BKPSDM	5,04	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-		
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional													
				Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah dokumen sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang disusun	BKPSDM	5,04	0	0%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan rasio kepemilikan sertifikat kompetensi ASN	5,04	-		

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan arah dan panduan yang jelas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pembangunan SDM yang berkelanjutan guna mendukung visi dan misi Kabupaten Sumbawa menuju Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, baik dari internal maupun eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa. Apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pegawai yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan tata kelola kepegawaian dan pengembangan kualitas SDM aparatur.

Kami juga menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap rencana aksi yang telah disusun dapat dijalankan dengan optimal dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan SDM serta peningkatan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa.

Semoga dengan kerjasama dan dedikasi yang terus terjaga, kita dapat mencapai hasil yang maksimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan daerah ini.


BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH